



**ANALISIS EFISIENSI, PERTUMBUHAN DAN KESERASIAN  
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BENGKALIS**

**Emma Nirwana**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia*

[halbysharkan@gmail.com](mailto:halbysharkan@gmail.com)

**Fitriyadi Trisuswanto**

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Riau, Indonesia*

[adi.fitriyaditrisuswanto@gmail.com](mailto:adi.fitriyaditrisuswanto@gmail.com)

***Abstrak***

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja belanja daerah secara lebih spesifik terhadap realisasi belanja daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Audited Tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan Analisis Efisiensi Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja dan Analisis Keserasian Belanja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan mengolah data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Belanja untuk TA 2018, TA 2019 dan TA 2020 secara keseluruhan masuk dalam kategori Efisien. Sementara itu untuk Rasio Pertumbuhan Belanja disimpulkan bahwa total Belanja pada BAPENDA Kab. Bengkalis mengalami Peningkatan/Pertumbuhan Positif pada TA 2018-2019. Berbeda dengan pertumbuhan belanja TA 2019-2020 yang mengalami Penurunan/Pertumbuhan Negatif. Hasil analisis Keserasian Belanja menunjukkan bahwa Rata-rata Rasio Keserasian Belanja selama 3 (tiga) Tahun Anggaran 2019-2020 pada BAPENDA Kab. Bengkalis masih dikategorikan normal seperti pada umumnya.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan, Belanja Daerah

***Abstrack***

*The purpose of this research was to determine the financial performance of the government in the management of local revenue (BAPENDA) in Bengkalis Regency. Performance analysis has been carried out more specifically to government expenditure based on Audited Budget Realization Report (LRA) of the Period 2018-2020. This research used expenditure efficiency analysis, expenditure growth analysis and expenditure compatibility analysis. This study used descriptive qualitative methode by*

*collecting and processing data. Based on the result of the study by using the expenditure efficiency analysis show that the amount of spending was efficient for periode 2018- 2020. And then the expenditure growth analysis, the amount of spending has increased 2018 to 2019. Different result for the expenditure growth analysis period 2019-2020, the amount of spending rate has decreased And then the result of expenditure compatibility analysis, the amount of spending was normal as usual.*

**Keyword:** *Financial Performance, Government Expenditure*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah di Indonesia mendapatkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dampak pemberian otonomi daerah adalah setiap pemerintah daerah mendapatkan kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan daerah termasuk urusan pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menggambarkan belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung proses pemerintahan (Septa Soraida, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban

pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa lalu. Adapun pertanggungjawaban atas Belanja Daerah dapat dilihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam satu tahun anggaran, pemerintah daerah harus membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah berupa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (Dariana & Oktavia, 2018). LKPD akan berpengaruh dalam menilai kinerja pemerintah daerah (Mirnawati, et al. 2019).

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Hal itu disebabkan karena masyarakat sebagai pemberi dana publik (*public fund*) melalui pajak yang mereka bayarkan berkepentingan untuk mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan dengan semestinya, efisien, efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakannya. Karena sifat belanja yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat

penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepan (Mahmudi, 2007).

Analisis terhadap belanja daerah sesungguhnya dilakukan dalam rangka mengevaluasi dan mengukur kinerja pemerintah dari sisi keuangan dalam melaksanakan anggaran belanja seperti yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengukuran kinerja keuangan ini memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta bermanfaat dalam hal membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah (Nirwana. E, 2020). Pengukuran kinerja keuangan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menjabarkan kegiatan keuangan daerah sebagai bentuk representasi kepatuhan daerah terhadap APBD (Putri, R & Munandar, 2021). Sejalan dengan itu dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif dan akuntabel, maka analisis rasio keuangan terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan (Halim, Abdul, 2012). Beberapa analisis terhadap kinerja keuangan ditinjau dari analisis belanja dapat dilakukan melalui pengukuran dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya adalah analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan analisis rasio efisiensi belanja. Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk menilai apakah sudah dilakukan

secara ekonomis, efisien, dan efektif (Suhaedi, W.,2019).

Studi ilmiah mengenai kinerja keuangan dan analisis belanja di pemerintah daerah di Indonesia sudah pernah dilakukan. Diantaranya oleh Juddy Julian, et.al (2017); Suhaedi, W. (2019); Putri, R., & Munandar, A. (2021); Septa Soraida. (2022). Bedanya adalah studi ini difokuskan untuk membuktikan secara ilmiah bagaimana kinerja belanja daerah saat Pandemi Covid'19 pada Badan Pendapatan Daerah Kab. Bengkalis. Terlebih lag; i dimasa pandemi Covid-19 dimana telah terjadi rasionalisasi anggaran belanja pemerintah di seluruh jajaran pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat sampai OPD yang ada dibawah pengelolaan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan struktur anggaran belanja pemerintah mengalami perubahan.

### **Belanja Daerah**

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah yang diantaranya terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Menurut Peraturan Bupati Bengkalis Nomor. 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja pemerintah yang dipertanggungjawabkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap tahunnya merupakan komponen penting yang mengundang perhatian publik. Secara normatif anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan. Kinerja pemerintah akan dinilai baik apabila pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi belanjanya. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja anggaran yang kurang baik (Warti Ratnasari, et al, 2019).

Struktur Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor: 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua adalah : Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran –hari anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset modal untuk perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin serta Aset Tak Berwujud. Sementara Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan

pemerintah pusat/daerah.

### **Analisis Belanja Daerah**

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efektif dan efisien (*value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Dengan menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja, semangat untuk melakukan efisiensi (penghematan) atas setiap belanja mutlak harus tertanam dalam jiwa setiap pegawai pemerintah daerah. Pemerintah tidak perlu lagi berorientasi untuk menghabiskan anggaran yang berakibat terjadinya pemborosan anggaran, tetapi hendaknya berorientasi pada *output* dan *outcome* dari anggaran (Mahmudi, 2007). Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat membuat analisis anggaran khususnya analisis belanja.

### **Analisis Efisiensi Belanja**

Analisis Efisiensi Belanja dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran. Rasio efisiensi belanja dihitung dengan menggunakan rumus (Mahsun, Muhammad, 2009) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327, hasil presentase efisiensi belanja pemerintah dikategorikan dalam beberapa tingkatan :

- ✓ > 100% : Tidak Efisien
- ✓ 90%-100%: Kurang Efisien
- ✓ 80%-90% : Cukup Efisien
- ✓ 60%-80% : Efisien
- ✓ < 60% : Sangat Efisien

### Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi dan penghematan anggaran. analisis pertumbuhan belanja dilakukan untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan masing-masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pertumbuhan anggaran belanja tertentu bisa saja negatif atau lebih kecil dari tahun sebelumnya jika memang belanja tersebut tidak prioritas untuk tahun sekarang. Anggaran tertentu yang tidak menambah nilai bahkan bisa dihilangkan atau dipangkas dan dialihkan untuk belanja lain yang prioritasnya lebih penting. Prinsipnya pertumbuhan belanja daerah harus terencana dan terkendali dengan baik agar kesinambungan dan stabilitas fiskal dapat terjaga. Rasio

pertumbuhan belanja dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2007):

$$\frac{\text{Belanja Thn } t - \text{Belanja Thn } t - 1}{\text{Belanja Thn } t - 1} \times 100\%$$

### Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi. Agar fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja.

Analisis keserasian belanja dapat berupa analisis belanja operasi terhadap total belanja dan analisis belanja modal terhadap total belanja.

Analisis Belanja Operasi terhadap total belanja dilakukan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Porsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja umumnya adalah adalah 60 s.d 90%. Rasio keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja dihitung dengan menggunakan rumus rumus (Mahmudi, 2007) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

Analisis Belanja Modal terhadap total belanja dilakukan untuk mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Porsi Belanja Modal terhadap Total Belanja umumnya adalah antara 5 s.d 20%. Rasio keserasian Belanja Modal terhadap Total Belanja dihitung dengan menggunakan rumus (Mahmudi, 2007) :

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100 \%$$

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis yakni Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis. Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (*financial performance*) pada Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA Kab. Bengkalis *Audited* BPK RI. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data yang sudah jadi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BAPENDA Kab. Bengkalis selama 3 (tiga) Tahun Anggaran yakni 2018 s.d 2020. Lebih lanjut penelitian ini menggunakan alat analisis rasio keuangan. Rangkaian analisis data dimulai dengan tabulasi akun, menghitung rasio keuangan yang telah ditentukan, diakhiri dengan pembahasan hasil analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Data realisasi Belanja Daerah pada BAPENDA Kab. Bengkalis disajikan pada Tabel.1.

Berdasarkan Tabel.1 secara umum realisasi belanja pada BAPENDA Kab. Bengkalis dari Tahun 2018 s.d 2020 mengalami kondisi berfluktuasi. Terlihat jumlah realisasi belanja tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar Rp31.730.957.930,00. Disisi lain jumlah realisasi belanja terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar Rp23.122.177.310,00.

**Tabel 1. Realisasi Belanja BAPENDA Kab.Bengkalis (dalam jutaan rupiah)**

No	Jenis Belanja	Realisasi Tahun		
		2018	2019	2020
<b>I. Belanja Operasi :</b>				
	Belanja Pegawai	12.923,28	14.908,47	12.736,55
	Belanja Barang dan Jasa	8.792,61	13.348,98	10.427,42
	<b>Jumlah :</b>	<b>21.715,89</b>	<b>28.257,46</b>	<b>23.163,98</b>
<b>II. Belanja Modal :</b>				
	Belanja Peralatan dan Mesin	1.303,24	2.859,66	0,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	59,52	0,00	0,00
	Belanja Gedung dan Bangunan	43,51	613,84	0,00
	<b>Jumlah :</b>	<b>1.406,28</b>	<b>3.473,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>23.122,18</b>	<b>31.730,96</b>	<b>23.163,98</b>
	<b>Belanja :</b>			

**Sumber : Laporan Realisasi Anggaran**

## Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja pada BAPENDA Kab. Bengkalis dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja (dalam %)**

No.		Rasio Efisiensi Belanja Tahun			Rata - Rata	Ket
		2018	2019	2020		
I.	Belanj Operasi	61,2 0	67,4 6	92,16	73,61	Efisien
II.	Belanja Modal	85,7 1	90,4 4	0,00	58,72	Sangat Efisien

**Sumber : Data Olahan, 2021**

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa rata-rata Rasio Efisiensi Belanja BAPENDA Kab. Bengkalis selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk Belanja Operasi masuk kategori *Efisien* dengan nilai **73,61%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum BAPENDA Kab. Bengkalis dinilai telah melakukan efisiensi anggaran. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Operasi yang diperoleh berada diantara angka rasio 60%-80% (Mahsun, Muhammad, 2009).

Selanjutnya Rasio Efisiensi Belanja Modal BAPENDA Kab. Bengkalis selama 3 (tiga) tahun terakhir masuk kategori *Sangat Efisien* dengan nilai **58,72%**. Belanja Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum BAPENDA Kab. Bengkalis dinilai telah melakukan efisiensi anggaran dengan kategori sangat efisien karena hasil perhitungan Rasio Efisiensi yang diperoleh kurang dari 60%. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa BAPENDA Kab. Bengkalis telah melakukan penghematan anggaran. Hal ini dibuktikan dari data Laporan Fisik dan Keuangan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dimana dengan prosentase dibawah 100% dapat mencapai penyelesaian fisik kegiatan/kinerja fisik rata-rata diatas 95%.

Di sisi lain, berdasarkan penyajian data pada Sub Bagian sebelumnya bahwa Realisasi Belanja Operasi pada BAPENDA Kab. Bengkalis mulai Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2020 mengalami fluktuasi. Lebih lanjut Belanja Modal pada BAPENDA Kab. Bengkalis mengalami penurunan signifikan di Tahun 2020 dimana tidak dianggarkan sama sekali. Berdasarkan data yang diperoleh melalui

Catatan Laporan Keuangan BAPENDA Kab. Bengkalis, penurunan belanja khususnya di Tahun 2020 terjadi dikarenakan terjadinya pemotongan/rasionalisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dialihkan anggarannya untuk biaya penanganan Pandemi COVID'19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini mesti dilakukan mengingat Amanat Pemerintah Pusat untuk fokus menghadapi kondisi yang terjadi saat ini di seluruh Pemerintah Daerah. Sehingga hal ini berdampak pada Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Belanja Operasi pada BAPENDA Kab. Bengkalis dengan kategori Efisien selama 3 (tiga) tahun terakhir dan Rasio Efisiensi Belanja Modal dengan kategori Sangat Efisien bahkan, sehingga anggaran belanja yang ada benar-benar termanfaatkan dengan baik mengingat rasionalisasi anggaran yang terjadi.

### Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja pada BAPENDA Kab. Bengkalis dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja TA. 2018 s.d 2020 (dalam %)**

No	Uraian	Rasio	Rasio
		Pertumbuhan TA 2018-2019	Pertumbuhan TA 2019-2020
I	Belanja Operasi	30,12	-18,03
II	Belanja Modal	147,00	0,00

**Sumber : Data Olahan, 2021**

Berdasarkan hasil diatas, Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi pada

Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 30,12%. Rasio Pertumbuhan Belanja Modal pada Tahun 2019 juga mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 147%. Sementara itu Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi pada Tahun 2020 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dari Tahun 2019 sebesar minus 18,03. Disisi lain untuk Rasio Pertumbuhan Modal bahkan tidak ada pertumbuhan sama sekali.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa BAPENDA Kab. Bengkalis dalam melakukan untuk Tahun 2018 dan 2019 aktifitas belanjanya tidak hanya memfokuskan kepada belanja operasional saja melainkan juga kepada belanja modal untuk perolehan aset yang memperoleh manfaat jangka panjang (Mahmudi, 2007). Sementara itu untuk Tahun 2020 terlihat bahwa hanya Belanja Operasi yang dianggarkan di BAPENDA Kab. Bengkalis. Hal ini terjadi karena adanya pemotongan/rasionalisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dialihkan anggarannya untuk biaya penanganan Pandemi COVID'19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini mesti dilakukan mengingat Amanat Pemerintah Pusat untuk fokus menghadapi kondisi yang terjadi saat ini di seluruh Pemerintah Daerah. Sehingga hal ini berdampak pada tidak adanya program kegiatan di di BAPENDA Kab. Bengkalis yang dianggarkan untuk Belanja Modal/Perolehan Aset pada tahun bersangkutan.

#### Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja

Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja pada BAPENDA

Kab. Bengkalis dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 4. Hasil Perhitungan Keserasian Belanja Operasi (dalam %)**

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Rasio Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	93,92	89,05	100	94,32

Sumber : *Data Olahan, 2021*

Dari Tabel tersebut terlihat bahwa porsi Belanja Operasi di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 masih termasuk dalam kategori umumnya yakni masih berkisar antara 60 sampai dengan 90% dari total belanja (Mahmudi, 2007). Walaupun cenderung berfluktuasi seperti yang terlihat, porsi Belanja Operasi ini sempat mengalami penurunan pada Tahun 2019, kemudian mengalami peningkatan kembali di Tahun 2020.

**Tabel 5. Hasil Perhitungan Keserasian Belanja Modal (dalam %)**

No	Uraian	2018	2019	2020	Rata-Rata
1	Rasio Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja	6,08	10,95	0,0	5,68

Sumber : *Data Olahan, 2021*

Sementara itu hasil perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja berdasarkan Tabel diatas



terlihat bahwa porsi Belanja Modal di Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 juga termasuk dalam kategori umumnya yakni masih berkisar antara 5 sampai dengan 20% dari total belanja (Mahmudi, 2007). Walaupun cenderung berfluktuasi seperti yang terlihat, di Tahun 2020 tidak dianggarkan untuk Belanja Modal/Belanja Perolehan Aset di BAPENDA Kab. Bengkalis. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa karena adanya pemotongan/rasionalisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang dialihkan anggarannya untuk biaya penanganan Pandemi COVID'19 yang terjadi di Indonesia saat ini. Hal ini mesti dilakukan mengingat Amanat Pemerintah Pusat untuk fokus menghadapi kondisi yang terjadi saat ini di seluruh Pemerintah Daerah. Sehingga hal ini berdampak pada tidak adanya program kegiatan di pada BAPENDA Kab. Bengkalis yang dianggarkan untuk Belanja Modal/Perolehan Aset.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis belanja daerah pada BAPENDA Kab. Bengkalis pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil analisis efisiensi belanja untuk Tahun 2018, Tahun 2019 dan TA 2020 secara keseluruhan tingkat kinerja Belanja masuk dalam kategori Efisien untuk Belanja Operasi dengan nilai 73,61% dan masuk kategori Sangat Efisien untuk Belanja Modal dengan nilai 58,72%. Jika dilihat capaian tersebut yang kurang dari 100%, ini membuktikan bahwa pada BAPENDA Kab. Bengkalis telah berusaha melakukan

penghematan dan efisiensi anggaran secara keseluruhan.

2. Hasil analisis pertumbuhan belanja Tahun 2018-2019 disimpulkan bahwa secara keseluruhan total Belanja pada pada BAPENDA Kab. Bengkalis mengalami Peningkatan/Pertumbuhan Positif yakni 30,12% untuk Pertumbuhan Belanja Operasi dan sebesar 147,00% untuk Pertumbuhan Belanja Modal.
3. Sementara itu hasil analisis pertumbuhan belanja Tahun 2019-2020 disimpulkan bahwa secara keseluruhan total Belanja pada pada BAPENDA Kab. Bengkalis mengalami Penurunan/Pertumbuhan Negatif yakni 18,03% untuk Pertumbuhan Belanja Operasi dan 0,00 % untuk Pertumbuhan Belanja Modal.
4. Hasil analisis Keserasian Belanja Operasi menunjukkan bahwa Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Operasi selama 3 (tiga) tahun terakhir pada pada BAPENDA Kab. Bengkalis adalah sebesar 94,32%. Artinya porsi Belanja Operasi adalah sebesar 94,32% dari keseluruhan belanja daerah. Hasil ini masih dikategorikan Keserasian Belanja Operasi yang normal, karena berada di kisaran 60 s.d 100%.
5. Sementara itu Hasil analisis Keserasian Belanja Modal menunjukkan bahwa Rata-rata Rasio Keserasian Belanja Modal selama 3 (tiga) tahun terakhir pada pada BAPENDA Kab. Bengkalis adalah sebesar 5,68%. Artinya porsi Belanja Modal adalah sebesar 5,68%

dari keseluruhan belanja daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa BAPENDA Kab. Bengkalis dapat mengendalikan belanja daerah, karena termasuk dalam kategori umumnya yakni masih berkisar antara 5 sampai dengan 20% dari total belanja.

## REFERENSI

- Halim, Abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun Muhammad. (2009). "Pengukuran Kinerja Sektor Publik". Yogyakarta.
- Dariana, D., & Oktavia, J. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 77-105. <https://ejournal.stiesyariah Bengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/132>
- Harry Al Makka, dkk. (2015). "Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kota Kotamobagu". *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 15 No.4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/9769>
- Juddy Julian Pilat, et al. Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemeintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal Accountability* Vol. 6 No : 1, 2017. h. 45-46. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/accountability/article/view/16026>
- Mirawati, M., Nirwana, E., & Hendarsyah, D. (2021). Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Organisasi Perangkat Daerah . *Akurasi : Journal of Accounting and Finance Studies*, 4(1), 31-44. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i1.73>
- Nirwana, E. (2020). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2017-2018. *Jurnal IAKP*, 1 (2) <http://ejournal.polbeng.ac.id/index.php/iakp/article/viewFile/1743817>
- Putri, R., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 2296-2313. Retrieved from <https://doi.org/10.31955/mea.v5i3.1684>
- Septa Soraida. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 1(2), 78–82.

- Retrieved from  
<https://doi.org/10.56127/jekma.v1i2.154>
- Suhaedi, W. (2019). Analisis Belanja Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 18(2), 63-78. Retrieved from  
<https://doi.org/10.29303/aksioma.v18i2.8>
- Warti Ratnasari, et al. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *Jurnal Of Economic, Mangement and Accounting* Vol. 2 No : 1, 2019. Retrieved from  
<https://ojs.unanda.ac.id/index.php/jemma/article/view/142>
- Presiden RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Presiden RI. (2010). Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.